

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA PULAU BAGUK
DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA MELALUI BUMDES
KARYA MANDIRI**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

MUSNI SETIAWAN T

NIM. 170801028

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musni Setiawan T
NIM : 170801028
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Analisis Peran Pemerintah Desa Pulau Baguk Dalam Pengembangan Potensi Wisata Melalui Bumdes Karya Mandiri

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Musni Setiawan T

**“ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA PULAU BAGUK
DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA MELALUI BUMDES
KARYA MANDIRI “**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :


MUSNI SETIAWAN T

NIM. 170801028

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Reza Idria, S.HI., M. A., Ph.D
NIP. 198103162011011003

Pembimbing II



Melly Masmi, M.I.R
NIP. 199305242020122016

**“ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA PULAU BAGUK
DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA MELALUI BUMDES
KARYA MANDIRI”**

SKRIPSI

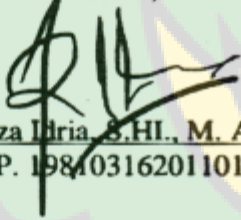
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022 M
21 Jumadil Awal 1444 H

Darussalam-Banda Aceh

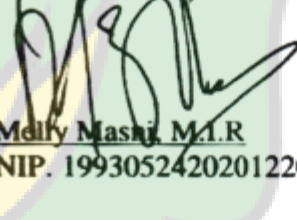
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



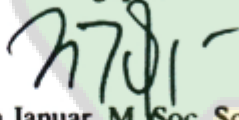
Reza Idris, S.HI., M. A., Ph.D
NIP. 198403162011011003

Sekretaris,



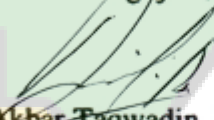
Melly Masni, M.I.R
NIP. 199305242020122016

Penguji I,



Eka Januar, M. Soc. Sc
NIP. 198401012015031003

Penguji II,



Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc
NIDN. 2008048903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Melly Masni, S.Ag., M.Ag
NIP. 197303271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Analisis Peran Pemerintah Desa Pulau Baguk Dalam Pengembangan Potensi Wisata Melalui BUMDes Karya Mandiri. Desa Pulau Baguk menjadi salah satu pelopor dalam pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata. Untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata tersebut, maka Pemerintah Desa Pulau Baguk mendirikan BUMDes yang diberi nama BUMDes Karya Mandiri. Melalui BUMDes tersebut, masyarakat mulai membuka lahan di salah satu pulau bernama Pulau Panjang. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran pemerintah desa Pulau Baguk dalam tahap-tahap kebijakan pembangunan BUMDes Karya Mandiri di Desa Pulau Baguk. Untuk mengetahui dampak pengembangan wisata dan pembangunan BUMDes Karya Mandiri bagi masyarakat Desa Pulau Baguk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian tahap-tahap kebijakan pembangunan BUMDes Karya Mandiri di Desa Pulau Baguk melalui empat tahap yaitu, pertama penyusunan agenda yaitu menentukan prioritas pembangunan yang akan dilakukan, setelah mengkaji potensi desa tersebut didapati wisata bahari berpotensi tumbuh baik kedepan. Kedua tahap formulasi kebijakan dimana memusyawarahkan bersama masyarakat dan perangkat desa untuk mendapat dukungan. Tahap ketiga adopsi kebijakan yaitu otorisasi kebijakan. Keempat tahap implementasi kebijakan dengan pelibatan masyarakat dan evaluasi didalamnya. Sedangkan dampak pengembangan wisata dan pembangunan BUMDes Karya Mandiri bagi masyarakat Desa Pulau Baguk dapat dilihat dari membaiknya pembangunan-pembangunan infrastruktur dan penyerapan tenaga kerja yang dapat mengembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata di Desa Pulau Baguk seperti kekurangan dana dalam pengelolaan, kekurangan SDM dan ketidakterbukaan tata kelola keuangan antara BUMDes Karya Mandiri dan pemerintah kepada masyarakat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa ikut terlibat dalam pengembangan potensi wisata bahari melalui BUMDes Karya Mandiri. Dengan hadirnya pemerintah desa dapat mendukung dalam penyediaan dana dan mendukung kemandirian desa.

Kata Kunci: *Peran pemerintah dalam pengembangan wisata bahari, BUMDes Karya Mandiri, Desa Pulau Baguk, Kabupaten Aceh Singkil*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Peran Pemerintah Desa Pulau Baguk Dalam Pengembangan Potensi Wisata Melalui BUMDes Karya Mandiri”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

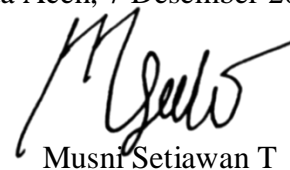
Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia S.A, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
3. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik.
4. Ramzi Murziqin, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik.
5. Reza Idria, S.HI., M. A.,Ph.D sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik. Melly Masni, M.I.R selaku pembimbing 2 yang telah sangat banyak memberikan masukan, saran dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Eka Januar, M. Soc. Sc selaku penguji 1 yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmunya kepada penulis. Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc selaku penguji 2 yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu kepada penulis.
7. Terima Kasih juga kepada Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.
9. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Muslim Tanjung serta Ibunda tercinta Azni Zalukhu yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 7 Desember 2022



Musni Setiawan T

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Konsep Pengembangan	13
2.3. Kebijakan Publik.....	15
2.4. Intervensi Pemerintah Lokal.....	21
2.5. Badan Usaha Milik Desa	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Pendekatan Penelitian	25
3.2. Fokus Penelitian.....	25
3.3. Lokasi Penelitian.....	25
3.4. Jenis dan Sumber Data	26
3.5. Informan Penelitian.....	26
3.6. Teknik Pengumpulan Data	27
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Profil Kepulauan Banyak Aceh Singkil	31
4.1.1. Profil Desa Pulau Baguk.....	34
4.2. Profil BUMDes Karya Mandiri	36
4.3. Peran Pemerintah Desa Pulau Baguk Dalam Tahap Kebijakan Pengembangan Pariwisata	38
4.3.1. Tahap Penyusunan Kebijakan.....	38
4.3.2. Tahap Formulasi Kebijakan.....	40
4.3.3. Tahap Adopsi Kebijakan	42
4.3.4. Tahap Implementasi Kebijakan.....	43
4.4. Dampak Pengembangan BUMDes Karya Mandiri Bagi Masyarakat Pulau Baguk	45
4.4.1. Pembangunan Infrastruktur.....	45
4.4.2. Penyerapan Tenaga Kerja	47

4.4.3. Tantangan Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Desa Pulau Baguk	51
BAB V PENUTUP	54
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa menjadi bagian vital yang tidak dapat dipisahkan dalam hirarki struktur bernegara, karena pada hakikatnya tidak akan ada suatu negara tanpa memiliki bagian-bagian terkecil yang dalam konteks negara Indonesia biasa disebut desa. Desa atau sebutan lain yang beragam disebut sebagai *self governing community* karena di Indonesia pada mulanya merupakan komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola daerahnya sendiri. Desa dengan pemerintahannya mengalami perkembangan dan pasang surut. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga kini yang terakhir adalah Masa Reformasi sampai sekarang.¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing rezim penguasa yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan memberikan pengaruh pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Begitu pula, dengan adanya pengakuan yang diiringi dengan pemberian kewenangan kepada desa sebagai daerah yang otonom untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Desa merupakan suatu otoritas terendah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Desa memiliki otonomi dalam membangun dan menjalankan

¹Rena Maulidiana, *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Kredit Sahabat (Krabat) Desa Labuan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2018)*, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (2020)

² Ibid

roda pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Konsep pembangunan di desa menjadi prioritas dalam pembangunan, bagaimana agar desa dan masyarakatnya bisa membangun dan mandiri serta bisa menyelesaikan problem-problem pembangunan. Sentuhan pembangunan desa terus dilakukan mulai dari zaman orde lama, orde baru sampai saat ini pasca reformasi. Berbagai sentuhan terus dilakukan dalam upaya memberdayakan desa dan masyarakatnya, berbagai jenis program pembangunan dilakukan oleh setiap rezim pemerintahan.⁴

Pasca reformasi kita mengenal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM Perdesaan), mulai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi desa melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) seperti simpan pinjam perempuan dan lain sebagainya. Seluruh elemen masyarakat desa dilibatkan dalam program tersebut. Pasca diundangkannya undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, pemerintah mengucurkan program dana desa. Pada tahun

³Anggraeni Rahmasari & Juliani Pudjowati *Strategi Pengembangan Desa Inovasi Pariwisata Kota Batu Dengan Local Economic Resources Development (LERD)*. Universitas Bhayangkara Surabaya (2017)

⁴ Ibid

2015 pemerintah mulai mengucurkan dana desa yang langsung ditransfer dari pusat ke desa.⁵

Pemerintah pusat menekankan empat bidang yang menjadi program pembangunan Desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pembangunan desa dan bidang pembinaan masyarakat desa. Dengan undang-undang yang baru desa diberikan kewenangan secara besar dalam membangun dan mengelola desa. Kita harus mempunyai konsep terkait pembangunan ekonomi dipedesaan dimana pembangunan ekonomi desa hendaknya dicarikan suatu model dan pendekatan yang cocok dengan situasi dan kondisi masyarakat di pedesaan.

Membangun ekonomi desa pada hakekatnya dalam rangka memandirikan masyarakat desa serta mensejahterakan rakyatnya. Dalam rangka membangun ekonomi desa perlu adanya kesinambungan program dan kegiatan, baik yang dilakukan oleh desa maupun program dan kegiatan yang berasal dari pusat dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Selanjutnya untuk mendukung pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat desa pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.⁶

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Modalnya berasal dari kekayaan

⁵ Ibid

⁶ Ibid

desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa.⁷ BUMDes juga merupakan sebuah strategi kebijakan dari pemerintah untuk membangun daerah-daerah terpencil atau terpinggirkan yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pengembangan usaha di desa secara kolektif. BUMDes juga salah satu strategi untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat di desa dan mendorong kemandirian desa sehingga mampu mengelola setiap unit-unit strategis yang dimilikinya. Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 87 menyatakan bahwa "Badan Usaha Milik Desa dikelola secara kekeluargaan dan bergotong royong guna mendayagunakan potensi daerah pedesaan seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, tujuannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa". Oleh karena itu, jelas bahwa BUMDes diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa di mana ia dikelola secara langsung oleh masyarakat desa.⁸

Salah satu daerah yang berhasil mengembangkan ekonomi masyarakat melalui BUMDes ialah Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Pulau Banyak adalah sebuah kecamatan yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Pulau Banyak sering menjadi destinasi untuk berlibur atau berwisata bagi para wisatawan. Tempat wisata kepulauan ini terdiri dari berpuluh-puluh pulau kecil yang hanya dapat dicapai dengan menggunakan transportasi laut seperti kapal, kapal cepat dan kapal

⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Lembaran Negara Tahun 2014.

⁸Andi Adnan, "*Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*".hlm. 1.

kecil milik nelayan setempat. Kecamatan Pulau Banyak sendiri memiliki tiga kawasan desa/kelurahan, di mana desa Pulau Baguk merupakan salah satunya. Desa Pulau Baguk menjadi salah satu pelopor dalam pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata. Untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata tersebut, maka pemerintah desa Pulau Baguk mendirikan BUMDes yang diberi nama BUMDes Karya Mandiri. Melalui BUMDes tersebut, masyarakat mulai membuka lahan di salah satu pulau bernama Pulau Panjang.

Dirintis sejak 2018, Pulau Panjang yang sebelumnya merupakan pulau kosong tak berpenghuni dengan tumpukan semak belukar kini menjadi tempat singgah dan tujuan wisata yang menarik bagi para wisatawan. Untuk melihat pesona dan keindahan pariwisata Pulau Panjang, BUMDes Karya Mandiri pun menjadi singgahan pertama bagi para wisatawan yang berwisata ke Pulau Banyak. Hal ini dikarenakan Pulau Panjang hanya dapat dicapai lebih kurang dalam waktu 10 menit dengan menggunakan transportasi laut (speed boat) yang telah disediakan BUMDes Karya Mandiri.

Adapun daya tarik yang dimiliki Pulau Panjang terdapat pada keindahan pantai pasir putih dan air lautnya yang bewarna hijau kebiru-biruan. Keragaman terumbu karangnya pun menjadikan wisata alam Pulau Panjang menjadi salah satu destinasi yang digemari oleh para wisatawan. Kehadiran BUMDes Karya Mandiri telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Hingga kini, telah ada 51 orang tenaga kerja di BUMDes Karya Mandiri, yang terdiri dari 36 orang tenaga tetap dan 15 orang tenaga tidak tetap. BUMDes Karya Mandiri sendiri memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, mulai dari transportasi laut, usaha

kecil menengah, hingga pembuatan dan penjualan kerajinan tangan dan cinderamata.

Keberhasilan desa Pulau Baguk menjadi salah satu desa wisata tidak terlepas dari hasil kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Pengelola BUMDes Karya Mandiri. Desa Pulau Baguk bahkan masuk ke dalam 10 desa wisata di Indonesia yang dipromosikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, pada program virtual desa wisata yang sudah ditayangkan di youtube pesona indonesia. Dengan segala keberhasilan dalam pengelolaan sektor pariwisata tersebut, penulis tertarik untuk mempelajari strategi apa yang pemerintah desa gunakan dalam mendorong pengembangan wisata melalui BUMDes.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

- 1 Bagaimana peran pemerintah desa Pulau Baguk dalam tahap kebijakan pengembangan sektor pariwisata?
- 2 Bagaimana dampak pengembangan wisata dan pembangunan BUMDes Karya Mandiri bagi masyarakat Desa Pulau Baguk?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui peran pemerintah desa Pulau Baguk dalam tahap-tahap kebijakan pembangunan BUMDes Karya Mandiri di desa Pulau Baguk
- 2 Untuk mengetahui dampak pengembangan wisata dan pembangunan BUMDes Karya Mandiri bagi masyarakat desa Pulau Baguk

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan untuk :

- 1 Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan-pembahasan mengenai kebijakan pemerintah Desa dalam mengembangkan usaha milik desa khususnya di bidang pariwisata. Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang terkait.
- 2 Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dapat pula dijadikan sebagai masukan bagi pihak pemerintah desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak untuk meningkatkan pengembangan potensi wisata bahari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dengan adanya penelitian terdahulu, penulis mendapatkan sejumlah referensi dalam melaksanakan penelitian ini sehingga bisa memperdalam dan ikut berkontribusi dalam memperkaya kajian pada area yang sama.

Adapun hasil dari penelitian terdahulu antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rena Maulidiana Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (2020) dengan judul *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Kredit Sahabat (Krabat) Desa Labuan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2018)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum strategi pemerintah desa dan penyelenggara BUMDes di Desa Labuan Mapin mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Petani setempat melalui kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu Kredit Sahabat (Krabat) dari tahun 2017 sampai 2018, tetapi dalam pengoperasiannya dipengaruhi oleh banyak aspek seperti Strategi Komunikasi, Strategi Program Sumber Daya, dan Strategi Kelembagaan. BUMDes di Desa Labuan Mapin tidak berjalan optimal

disebabkan tidak adanya sosialisasi program kepada masyarakat, minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ely Triyo dkk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya (2020) dengan judul *Strategi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi pada BUMDes Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)*. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa BUMDes dalam meningkatkan inovasi potensi ekonomi lokal Desa perlu ditingkatkan lagi dan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luar biasa karena BUMDes Mandiri bisa memberikan pelayanan masyarakat yaitu mempermudah masyarakat dalam mengambil pinjaman modal usaha tanpa harus berutang kepada bank.¹⁰
3. Penelitian yang dilakukan Andi Adnan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar (2021) dengan judul *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pitumpidanenge Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*. Hasil Penelitian menerangkan bahwa 1. Strategi Organisasi yang dilaksanakan dilihat dari keterkaitan antara program yang dilakukan

⁹Rena Maulidiana, *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Kredit Sahabat (Krabat) Desa Labuan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2018)*, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (2020)

¹⁰Ely Triyo *Strategi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi pada BUMDes Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya (2020)

dengan visi misi BUMDes telah memenuhi semua kriteria yang ada pada visi misi. 2. Strategi pendukung sumber daya belum bisa dikategorikan baik dilihat dari empat aspek yaitu Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh BUMDes kebanyakan diantaranya sudah tidak digunakan lagi. 3. Strategi Program sudah terpenuhi dilihat dari dua dimensi yaitu, implikasi program terhadap organisasi dilihat dari usaha simpan pinjam, wisata kuliner, dan warkop yang sangat membantu masyarakat secara langsung.¹¹

4. Penelitian yang dilakukan Anggraeni Rahmasari & Juliani Pudjowati Universitas Bhayangkara Surabaya (2017) dengan judul *Strategi Pengembangan Desa Inovasi Pariwisata Kota Batu Dengan Local Economic Resources Development (LERD)*. Hasil dari penelitian tersebut pengembangan desa inovasi pariwisata kota Batu dengan local economic resources development dengan sosialisasi dan dana dirasakan sudah mendukung pelaksanaan program. Kegiatan sosialisasi selama ini sudah memberikan informasi sehingga masyarakat memahami program pemberdayaan ini. Sedangkan sumber daya manusia pelaksana program sudah sesuai karena merupakan orang-orang sekitar dan sudah paham kondisi wilayahnya. Dampak strategi pengembangan desa inovasi pariwisata kota Batu dengan local economic resources development

¹¹Andi Adnan *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pitumpidanenge Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar (2021)

adalah penguatan UKM dirasakan sudah berkembang dan sangat memberikan hasil kepada masyarakat.¹²

5. Penelitian terdahulu dilakukan Muhamad Imron Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang dengan judul *Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas Di Desa Palaan*. Hasil dari penelitian tersebut di Desa Palaan, model Quadruple Helix ini mampu melahirkan ide dan kreatifitas hingga pengetahuan baru melalui dukungan seluruh aktor (pemerintah, akademisi, bisnis atau pelaku usaha kreatif, dan masyarakat). Dukungan dari seluruh helix yang ada dibutuhkan untuk terus mendorong hadirnya kreatifitas dari sektor manapun. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi pengguna ide dan kreatifitas dari helix lainnya, mereka juga dapat menunjukkan bahwa kreatifitas dan inovasi juga dapat muncul dari masyarakat. Saat kreatifitas dan inovasi dapat selalu dihadirkan, maka setiap produk akan memiliki nilai tambah yang unggul dan berdaya saing.¹³
6. Penelitian terdahulu dilakukan Puji Wahyono, Maulana S Kusuma, Djoko Poernomo Universitas Jember dengan judul *Sentuhan Kreativitas dan Inovasi Wisata Kuliner Bahari Berkelanjutan (Karamba Jaring Apung di Kabupaten Situbondo)*. Hasil dari penelitian tersebut

¹²Anggraeni Rahmasari & Juliani Pudjowati *Strategi Pengembangan Desa Inovasi Pariwisata Kota Batu Dengan Local Economic Resources Development (LERD)*. Universitas Bhayangkara Surabaya (2017)

¹³Muhamad Imron, *Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas Di Desa Palaan* Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang 2021

menemukan bahwa sejumlah pengelola Karamba Jaring Apung (KJA) yang mampu bertahan karena mereka mengembangkan diversifikasi usaha. Mereka hadir sebagai innovator yang kreatif, mengembangkan potensi bahari dan tidak sekedar menangkap ikan, tetapi mengkombinasikan pula dengan wisata kuliner di atas KJA. Destinasi wisata ini ramah lingkungan dengan menjadikan ikan hasil budidaya sebagai bahan bakunya. Kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci dalam menciptakan destinasi wisata ini, sehingga mampu mengubah hal yang biasa saja menjadi luar biasa. Jadi wisata kuliner bahari sangat potensial untuk dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata.¹⁴

7. Penelitian terdahulu dilakukan oleh I Gede Anom Sastrawan & I Nyoman Sunarta Fakultas Pariwisata Unud dengan judul *Strategi Pengembangan Potensi Wisata Bahari Di Pantai Crystal Bay Desa Sakti, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungklung*. Hasil dari penelitian tersebut strategi pengembangan pantai Crystal Bay, desa Sakti yang dianalisis dengan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sehingga dapat ditentukan potensi yang dapat dikembangkan dan strategi dalam pengembangan daya tarik wisata bahari pantai Crystal Bay dengan memanfaatkan potensinya secara optimal dan tetap menjaga kelestariannya. Pengembangan potensi daya tarik wisata sudah tidak lepas dari kendala-kendala yang dapat menghambat laju pengembangan. Begitu pula hanya dengan

¹⁴Puji Wahyono, Maulana S Kusuma, Djoko Poernomo *Sentuhan Kreativitas dan Inovasi Wisata Kuliner Bahari Berkelanjutan (Karamba Jaring Apung di Kabupaten Situbondo)*. Universitas Jember 2021

pengembangan pantai Crystal Bay yang terjadi di lapangan dimana perlu diambil kebijaksanaan pemecahannya.¹⁵

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan ialah pada lokasi penelitian di mana penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

2.2. Konsep Pengembangan

Meneliti pengembangan kawasan wisata pada dasarnya merupakan langkah dari kegiatan pengembangan pembangunan nasional. Di mana sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan devisa negara. Karena itu, sektor ini merupakan sektor yang berperan penting dalam pengembangan. Sektor pariwisata menjadi sektor yang menuntut pemerintah untuk memberikan andil yang besar dalam pengelolaannya.¹⁶

Berikut beberapa pandangan dari ahli pengwilayahan yaitu Sugiyono, Sujadi dan Iskandar Wiyokusumo menyatakan bahwa pengertian pengembangan adalah suatu perubahan bentuk struktur dan fungsi dari wilayah.

1. Pengembangan adalah perubahan struktur dan fungsi yang mengarah kepada perbaikan atau memanfaatkan suatu kondisi lingkungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁵I Gede Anom Sastrawan & I Nyoman Sunarta *Strategi Pengembangan Potensi Wisata Bahari Di Pantai Crystal Bay Desa Sakti, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungklung*. Fakultas Pariwisata Unud 2021.

¹⁶Rusneni Ruslan, *Strategi Pengembangan Wisata Bahari Kabupaten Takalar*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.hlm. 8.

2. Pengembangan adalah suatu proses perubahan kondisi statis menjadi dinamis guna mengembangkan segala potensi pengembangan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷
3. Pengembangan dibedakan atas tiga model yaitu pengembangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pengembangan jangka pendek yaitu mengembangkan kuantitas suatu wilayah, pengembangan jangka menengah yaitu memperbaiki kualitas suatu wilayah dan pengembangan jangka panjang memajukan segala potensi suatu wilayah yang dikembangkan.¹⁸

Menurut Coherty setiap perubahan waktu dari suatu kegiatan disebut pengembangan. Ketiga orientasi terjadinya suatu pengembangan adalah waktu, kegiatan dan tujuan. Hal tersebut yang akhirnya memberikan suatu pengertian bahwa pengembangan adalah suatu proses waktu yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan atau aktifitas yang bermanfaat dalam mengubah suatu wilayah untuk mencapai tujuan. Waktu yang dimaksud adalah periode dari suatu kegiatan pembangunan. Aktifitas adalah kegiatan atau penyelenggaraan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Tujuan yang dimaksud adalah tercapainya pembangunan yang utuh dan mewujudkan masyarakat yang adil dan merata.

¹⁷Anshory, A., *Penerapan Aktivitas Pengembangan Wilayah*, Binarupa: Jakarta, 2002.

¹⁸Trisna, *Laporan Akhir Kajian Perencanaan Strategis Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata di Kampung Pasir Kunci*, Bandung: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2016.

2.3. Kebijakan Publik

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi karena sering didengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam perkuliahan ilmu politik. Secara umum istilah kebijakan (*policy*) digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.¹⁹

Menurut Woll kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah sosial di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi ciri khusus dari kebijakan publik. Kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh apa yang dikatakan oleh David Easton sebagai penguasa dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi pada suku-suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasehat raja dan semacamnya. Menurut Easton mereka ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sistem politik, diakui oleh sebagian besar anggota-anggota sistem politik, mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah ini, dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam waktu yang panjang oleh sebagian terbesar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan.²⁰

¹⁹Januar Dwi Baskoro, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa: Yogyakarta, 2018.

²⁰Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2012. hlm. 22-23.

Sebagai penguasa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik, harus memperhatikan analisis kebijakan, karena analisis kebijakan merupakan kajian yang tidak tertutup pada kajian dari sektor publik saja, karena sektor privat pun banyak memanfaatkan metode-metode analisis kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Ada tiga hal yang menyebabkan analisis kebijakan lebih lazim dikenal pada sektor publik.

Pertama, sektor publik secara nyata memiliki tingkat kompleksitas yang lebih dari sektor privat. Artinya, sektor publik yang terdiri dari banyak aktor dan kepentingan memerlukan metode yang lebih lengkap untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pemerintah dengan banyaknya aktor, kepentingan dan kompleksitas masalah lebih memerlukan alternatif-alternatif kebijakan untuk lebih memuaskan publik (stakeholder) dari masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor privat.

Kedua, sektor publik memiliki resiko lebih tinggi untuk menghadapi masalah-masalah yang tidak dapat diprediksi. Artinya, sektor publik lebih memiliki peluang untuk mendapatkan masalah-masalah baru dari kondisi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kejadian seperti ini lebih dimiliki sektor publik ketimbang sektor privat.

Ketiga, sektor publik memiliki ruang lingkup masalah yang lebih luas dari sektor privat. Artinya, pemerintah memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih memiliki cakupan luas, dan pertimbangan-pertimbangan yang lebih kompleks dari analisis kebijakan yang dimiliki sektor privat. Sampai dengan saat ini analisis kebijakan lebih diperlukan sektor publik dari sektor privat.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita didalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli membagi tahapan-tahapan kebijakan ini dengan urutan yang berbeda misalnya, tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dibawah ini bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan.²¹

Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :

a) Tahap Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah tahap-tahap kebijakan publik pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijakan publik yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Penyusunan agenda merupakan suatu proses yang sangat baik untuk memaknai apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang dipilih dan ditentukan adalah kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan prioritas masyarakat secara keseluruhan, bukan prioritas masyarakat secara kelompok ataupun golongan tertentu. Dalam menentukan prioritas kebijakan, pemerintah dapat menimbang dan melihat aspirasi rakyat yang disalurkan melalui

²¹Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2012. hlm. 34-35.

DPR maupun DPRD sesuai dengan tingkatan wilayahnya agar kedua lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.

b) Tahap Formulasi Kebijakan

Tahapan kedua yang dilakukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik adalah *policy formulating* atau melakukan formulasi kebijakan. Pokok-pokok permasalahan yang sudah ditentukan dan diramu sedemikian rupa oleh pemerintah kemudian dibahas secara lebih lanjut di dalam forum khusus untuk menetapkan kebijakan yang akan berlangsung di dalam negara atau daerah. Di dalam peramuan atau formulasi kebijakan publik, tentunya akan terjadi dialog atau diskusi diantara pemangku kebijakan. Oleh karena itu, setiap peserta dialog atau diskusi perlu memperhatikan cara mengemukakan pendapat di muka umum agar proses peramuan yang dilakukan tidak menimbulkan konflik di antara anggota forum.

c) Tahap adopsi kebijakan

Policy adoption atau pengadopsian kebijakan merupakan tahapan ketiga yang dilakukan pemerintah dalam menentukan kebijakan publik yang akan diberlakukan secara umum bagi masyarakat. Adopsi kebijakan ini mempunyai tujuan secara legitimitasi untuk memberikan otorisasi atau kuasa pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik. Otorisasi atau kuasa yang diberikan kepada pemerintah dimaksudkan agar hanya pemerintahlah yang dapat

melakukan perubahan atau perbaikan di dalam kebijakan publik. Selain itu, dalam tahapan ini, pemerintah juga dimungkinkan untuk melakukan adopsi kebijakan dari negara lain maupun daerah lain yang dirasa cocok untuk diterapkan di wilayah negaranya semata-mata sebagai salah satu tindakan untuk cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia.

d) Tahap implementasi kebijakan

Tahapan keempat yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan atau menetapkan kebijakan publik adalah *policy implementation*. *Policy implementation* atau implementasi kebijakan adalah suatu langkah yang dapat disebut sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat secara luas. Dalam tahapan ini, pemerintah melakukan perannya sebagai pengawas untuk mengawasi jalannya kebijakan publik yang berlaku di lingkungan masyarakat. Sebagai negara yang memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, pemerintah juga melibatkan peran serta masyarakat untuk mengawasi penerapan kebijakan publik yang berlaku di dalam masyarakat. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan kritik dan saran terhadap kebijakan publik yang ditetapkan. Kritik dan saran dapat disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebijakan publik yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada substansi, penerapan, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan publik itu sendiri. Melalui tahapan evaluasi inilah pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap kebijakan publik yang berlaku berdasarkan pengalaman yang telah dilalui selama kebijakan publik tersebut terlaksana.

Istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menunjuk suatu kegiatan yang mempunyai maksud berbeda. Para ahli mengembangkan berbagai macam definisi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan dan kebijakan publik. Masing-masing definisi memberikan penekanan yang berbeda-beda, namun definisi yang dianggap lebih tepat adalah suatu definisi yang menekankan tidak hanya pada apa yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, para ilmuwan dalam mengkaji kebijakan publik dapat menempatkan ilmu politik sebagai ilmu yang bebas nilai atau sebaliknya, ia dapat terlibat aktif dalam memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. Sehingga tidak bebas nilai. Sisi lain, perhatian para ilmuwan politik semakin besar. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya tulisan dan studi menyangkut kebijakan publik. Area yang dapat dikaji dalam kebijakan publik semakin luas meliputi keseluruhan tahap

dalam pembuatan kebijakan, seperti dalam tahap agenda kebijakan, perumusan kebijakan, hingga evaluasi kebijakan.²²

2.4. Intervensi Pemerintah Lokal

Memahami hubungan antara pemerintah, tingkat kebebasan yang diberikannya dan daya saing pariwisata sangatlah penting. Intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam situasi yang menyediakan besar keuntungan bersih atau di mana semua orang mendapat manfaat, memaksimalkan kesejahteraan sosial. Pandangan ini beresonansi dengan Devin yang menegaskan bahwa jika perencanaan, promosi dan pengelolaan pariwisata adalah diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta, hal ini dapat mengakibatkan tidak seimbangnya pembangunan infrastruktur dan perluasan pasar, dengan risiko kemacetan yang semakin bertambah dan peningkatan tekanan pada sumber daya lingkungan.

Tanpa intervensi pemerintah, tujuan pariwisata berkelanjutan mungkin bergantung pada tindakan sukarela atau self-regulation, dan tidak semua sector akan merespon secara positif. Bramwell & Jalur berpendapat bahwa aktor mungkin gagal untuk menanggapi sukarela inisiatif karena ketidaktertarikan, keberatan dengan inisiatif atau karena mengambil langkah-langkah yang diperlukan itu melibatkan berbagai biaya Perwakilan politik pemerintahan juga mengalami penyusutan pada kepercayaan publik dan keterlibatan, dan telah dilengkapi dengan penggunaan forum dan konsultasi publik yang lebih besar. Pengaruh berkelanjutan negara bisa terjadi, misalnya, melalui pemerintahan halus pengarahannya prioritas tindakan lembaga-lembaga baru dan kemitraan.

²²Ibid. hlm. 36-37.

Pengambilan keputusan pengembangan pariwisata inheren politik, dengan kebutuhan, tuntutan, nilai-nilai, kepentingan, ideologi dan pengaturan kekuasaan berinteraksi dan membentuk proses pengambilan keputusan kontribusi terhadap keberlanjutan.

2.5. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat menjadi BUMDes merupakan suatu lembaga atau usaha yang dikelola oleh pemerintah desa serta masyarakatnya bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa. Definisi BUMDes Menurut Maryunani mengatakan bahwa BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat desa dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan perekonomian di desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat di desa berdasarkan kebutuhan serta mengembangkan potensi di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah strategi kebijakan dari pemerintah untuk membangun Indonesia pinggiran atau terpencil melalui pengembangan usaha di desa yang bersifat kolektif. BUMDes juga salah satu strategi untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat di desa dan sebagai bentuk kemandirian desa mampu mengelola setiap unit-unit yang strategis bagi usaha desa.²³

Dalam perkembangannya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangunnya, masih jauh dari harapan. BUMDes sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian, ekonomi

²³Ely Triyo *Strategi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi pada BUMDes Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya (2020)

dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha. Peran BUMDes bagi desa adalah yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap jalanya penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber potensi alam dan manusia di desa agar berkembang menjadi sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) mengatakan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan ini juga tercantum dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa.²⁴

Terciptanya Badan Usaha Milik Desa dikarenakan, sudah dititik beratkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pemerintah, desa dapat mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa. Menurut Purnomo maksud dan tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu :

- Menumbuhkan perkembangan perekonomian desa
- Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
- Memberikan manfaat umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat masyarakat desa.
- Sebagai perintis bagi kegiatan usaha didesa.

²⁴ Ibid

Dari tujuan dan maksud dari BUMDes mempunyai posisi penting dalam desa. Sehingga perlu diketahui bagaimana BUMDes itu berjalan sebagaimana mestinya.²⁵



²⁵ Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui analisis peran pemerintah desa Pulau Baguk dalam pengembangan potensi wisata melalui BUMDes Karya Mandiri. Maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.²⁶ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan membahas tentang Analisis Peran Pemerintah Desa Pulau Baguk Dalam Pengembangan Potensi Wisata Melalui BUMDes Karya Mandiri.

3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dengan pertimbangan daerah Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu tujuan wisata sehingga dengan potensi wisata tersebut dapat

²⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11

mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat dengan usaha-usaha masyarakat.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Di dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui obeservasi, wawancara langsung dengan informan.
- b. Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian BUMDes

3.5. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka dari keseluruhan unit analisis peneliti mengambil beberapa orang informan. Informan adalah seseorang yang

benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Adapun informan yang diambil dari unit analisis dalam penelitian ini adalah:

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil	1
2	Kepala Desa Pulau Baguk	1
3	Ketua BUMDes Karya Mandiri	1
4	Masyarakat	5
	Jumlah	8

Jumlah tersebut ditetapkan karena para informan penelitian dalam penelitian ini telah mewakili jawaban atas permasalahan yang penulis tanyakan atau telah mencapai titik jenuh, sehingga telah dapat diambil kesimpulan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁷ Teknik pengumpulan data

²⁷Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang, maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam melakukan penelitian.²⁸ Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan pengamatan peneliti untuk memperbanyak hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang tetapi juga terhadap objek alam lainnya, agar peneliti lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu,

²⁸Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi, hal.165

yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).²⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.³⁰

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bisa ditarik.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan

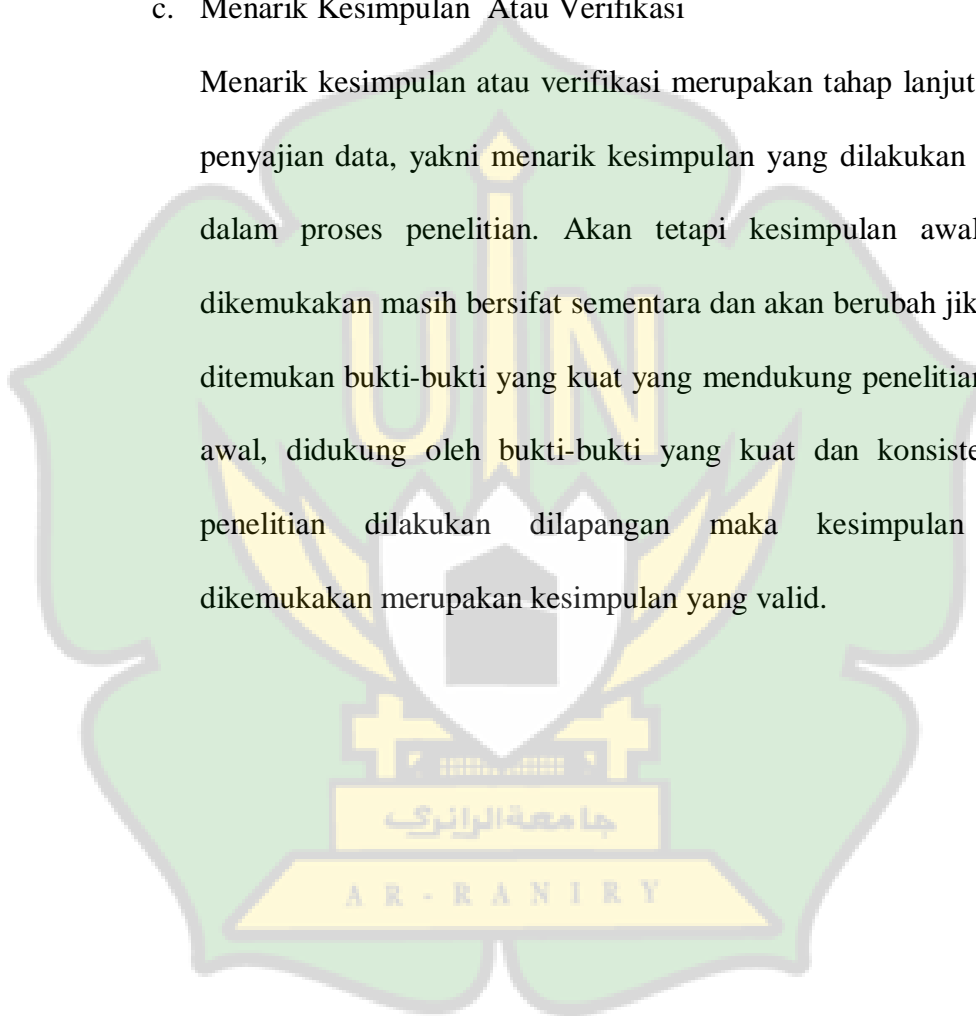
²⁹Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.23

³⁰Johni Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100

atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

c. Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Kepulauan Banyak Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil adalah sebuah kabupaten yang berada di ujung Barat Daya Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan yang diresmikan pada tanggal 27 April 1999 oleh Gubernur Provinsi Aceh Prof. Dr. H. Syamsudin Mahmud, M.Si. Kabupaten ini juga terdiri dari sebelas kecamatan dan dua kecamatan berada di daerah kepulauan yaitu Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat dengan luas wilayah 2.185,00 km².

Kabupaten Aceh Singkil memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Pakpak Barat (Provinsi Sumatera Utara) dan Kota Subulussalam.
- Sebelah Selatan Samudera Hindia
- Sebelah Barat Kabupaten Aceh Selatan
- Sebelah Timur Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara)

Kabupaten Aceh Singkil memiliki jumlah penduduk sebanyak 126.833 Jiwa. Penduduk asli kabupaten ini adalah suku Singkil, Aneuk Jamee dan Haloban. Selain itu dijumpai juga suku-suku pendatang seperti suku Aceh, Minang dan Pakpak. Kabupaten Aceh Singkil terkenal dengan nama Tanah Batuah (tanah keramat) yang mana di tanah ini dilahirkan seorang sosok ulama besar sufi seantero dunia yang bernama Syekh Abdurrauf As Singkily, beliau adalah seorang ulama besar sufi Aceh yang menyebarkan agama Islam sampai ke

sumatera barat dan nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Teungku Syiah Kuala (bahasa Aceh, artinya Syekh Ulama di Kuala). Kabupaten Aceh Singkil secara alamiah adalah negara pertanian dengan budaya pertanian yang kuat. Bertani, beternak, berburu ikan dilaut adalah keahlian turun-menurun yang sudah mendarah daging. Teknologi dasar ini sudah dikuasai sejak jaman nenek moyang. Karena budaya pertanian yang telah mendarah daging maka usaha pada sektor pertanian sebenarnya dapat dipacu untuk berproduksi sebesar-besarnya.³¹

Luasnya lahan, cadangan air yang melimpah, dan potensi wilayah yang tersedia mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi yang mendukung menjadi obsesi dalam menjadikan Kabupaten Aceh Singkil sebagai pemasok hasil pertanian unggulan di kemudian hari. Kabupaten Aceh Singkil memiliki potensi sumberdaya yang tidak akan pernah habis, dan akan tetap ada sepanjang usia alam itu sendiri yakni Hutan dan laut. Pada umumnya hasil pertanian di Aceh Singkil tanaman kelapa sawit yang telah lebih dahulu mendominasi sebagai tanaman perkebunan rakyat ataupun perkebunan perusahaan yang telah memberikan sumbangan terbesar bagi pendapatan masyarakat. Selain sebagai petani sawit, masyarakat Aceh Singkil berprofesi sebagai Nelayan dan pencari kerang yang dalam bahasa singkilnya disebut dengan “lokan”. Selain hasil dari potensi darat, Laut juga memberikan peranan yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang berada dikecamatan kepulauan.

³¹[Http://www.profilesapulaubanyak.go.id](http://www.profilesapulaubanyak.go.id). Diakses pada tanggal 24 November 2022 di Kabupaten Aceh Singkil

Kepulauan Banyak adalah gugusan pulau-pulau kecil di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Luas wilayah secara keseluruhan adalah 27,196 ha. Pulau Banyak berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, tepatnya di ujung sebelah barat Pulau Sumatra. Sebagai daerah kepulauan, Pulau Banyak selain memiliki laut yang cukup luas juga pantai yang panjang dan indah. Kepulauan ini terdiri dari 63 pulau besar dan kecil yang terletak di sebelah barat pulau Sumatra berjarak 26 mil laut lepas pantai Singkil. Pulau Banyak memiliki luas daratan sebesar 135 km² dan laut seluas 200.000 ha. Pulau terbesarnya adalah Pulau Tuangku disusul Pulau Bangkaru, Pulau Ujung Batu dan Pulau Palambak Besar. Selain itu juga terdapat Pulau Balai, Pulau Baguk, Pulau Palambak Kecil, Pulau Sikandang dan lain-lain.³²

Pulau Banyak dibagi dalam dua kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Pulau Banyak, terdiri dari 3 desa yaitu desa Pulau Balai, Pulau Baguk dan Teluk Nibung. Sebagai Ibu Kota Kecamatan adalah Desa Pulau Balai
2. Kecamatan Pulau Banyak Barat, terdiri dari 4 desa yaitu desa Haloban, Asantola, Ujung Sialit dan Suka Makmur. Sebagai Ibu Kota Kecamatan adalah Desa Haloban

Berdasarkan data statistik tahun 2019, jumlah penduduk Pulau Banyak berjumlah 4 610 jiwa. Dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2315 orang dan penduduk laki-laki sebanyak 2295 orang. Di Pulau Banyak terdapat 3 suku yaitu Suku Aneuk Jamee, Suku Haloban dan Suku Nias. Suku Aneuk Jamee

³² Ibid

mendiami 3 desa di Kecamatan Pulau Banyak, yaitu desa Pulau Balai, Pulau Baguk dan Teluk Nibung. Suku Haloban mendiami 2 desa di kecamatan Pulau Banyak Barat yaitu desa Haloban dan Asantola. Sedangkan Suku Nias mendiami 2 desa di Pulau Banyak Barat yaitu desa Ujung Sialit dan Suka Makmur.³³

Terdapat 3 bahasa yang dituturkan di kepulauan ini yaitu Bahasa Aneuk Jamee, Bahasa Haloban dan Bahasa Nias. Bahasa Aneuk Jamee dituturkan oleh suku Aneuk Jamee. Selain itu bahasa ini adalah bahasa bagi ketiga etnis di kepulauan ini selain Bahasa Indonesia. Bahasa Haloban dituturkan oleh suku Haloban sedangkan bahasa Nias dituturkan oleh suku Nias. Mayoritas agama yang dianut oleh penduduk Pulau Banyak adalah agama Islam. Agama Islam dianut oleh suku Aneuk Jamee, suku Haloban dan Suku Nias di desa Suka Makmur. Selain agama Islam juga terdapat agama Kristen yang dianut oleh suku Nias yang terdapat di desa Ujung Sialit. Pekerjaan utama yang ditekuni oleh masyarakat ialah mencari ikan atau nelayan, petani, dan sebagiannya lagi bekerja di pemerintahan.³⁴

4.1.1. Profil Desa Pulau Baguk

Desa Pulau Baguk merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Terdapat 388 keluarga, ada kepala desa, ada sekretaris desa dan 12 Aparatur Pemerintahan, ada BPD/lembaga masyarakat dengan jumlah anggota 5 orang. Pemerintah desa Pulau Baguk saat ini dalam mengembangkan potensi yang di miliki Desa berfokus pada sektor pariwisata. Sejak tahun 2018 sampai sekarang pemerintah desa terus mengembangkan potensi yang dimiliki desa Pulau Baguk sehingga bisa berhasil seperti saat ini.

³³ Ibid

³⁴ Ibid

Data Umum

Desa	: Pulau Baguk
Kecamatan	: Pulau Banyak
Kabupaten	: Aceh Singkil
Kepala Desa	: H A R D I
Masa Jabatan Kepala Desa	: Dari Tahun 2018 s.d. 2024
Luas Desa	: \pm 1500 Hektar
Alamat Kantor Kepala Desa	: Jl. Swadaya, (Pos Kode 23791)
No Telepon/HP	: -
Email	: -
Batas-Batas Desa	
- Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Samudera Hindia dan Kuala Baru
- Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Samudera Hindia dan Pulau Banyak Barat
- Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Desa Pulau Balai
- Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Samudera Hindia dan Pulau Banyak Barat

Data Penduduk

Jumlah Laki-laki	775 Jiwa
Jumlah Perempuan	742 Jiwa
Jumlah Total	1517 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	388 KK

Mata Pencarian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	67	
Pelajar / Mahasiswa	173	146
Peternak	46	4
Pegawai Negeri Sipil	51	33
Pengrajin Industri Rumah Tangga	9	21
TNI/POLRI	17	
Montir	3	
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	10	
Pedagang Keliling	12	
Nelayan	318	

Dukun Kampung		1
Karyawan Perusahaan Swasta	20	4
Jumlah Total Penduduk	681	205

4.2. Profil BUMDes Karya Mandiri

BUMDes Karya Mandiri merupakan salah satu BUMDes yang berada di Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil. BUMDes ini didirikan pada tahun 2018. Banyak yang sudah dilakukan oleh BUMDes ini dalam membangun perekonomian masyarakat desa Pulau Baguk melalui pariwisata. Desa Pulau Baguk sebelum dikelola oleh BUMdes tempatnya tidak begitu dikenal oleh masyarakat bahkan tidak terurus. Namun setelah bisnis BUMDes berdiri dan dipromosikan sehingga banyak masyarakat yang berkunjung dan pemberdayaan masyarakat terus dikembangkan, sehingga sudah ada Couttage sebagai tempat penginapan yang di dalamnya bekerja masyarakat sekitar. Dengan hadirnya BUMDes terlihat bidang pariwisata Pulau Banyak terkhusus di desa Pulau Baguk menunjukkan kemajuan dan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar.³⁵

Penghasilan yang diperoleh oleh BUMDes Karya Mandiri sebelum covid melanda itu rata-rata pendapatan Perbulan 15 sampai 20 juta. Namun saat covid melanda pendapatan turun drastis, hal ini dikarenakan adanya pembatasan terhadap pengunjung sehingga berdampak terhadap penghasilan BUMDes tersebut. Sedangkan untuk sumber dana pembangunan BUMDes tersebut di

³⁵ Data Profil BUMDes Karya Mandiri

dapatkan dari Dana Desa, KPDT Agrowisata dan KemenDes, dan proposal yang diajukan ke Dinas Pariwisata.³⁶

Jenis Usaha BUMDes

1. Kegiatan Usaha Yang Sedang Eksisting (Berjalan Saat Ini)

Nama Unit Usaha	Produk / Kegiatan Yang dilaksanakan atau dihasilkan
1. Unit Pariwisata	: 1. Speed Boat (Transportasi Jasa Wisata) 2. Lahan Wisata (Gazebo dan Saung), Penginapan (Couttage), Resto, AULA (Menerima Tempat DIKLAT/Pelatihan/ Seminar/ Acara Indoor), Kantin, Gerai Kelapa, Pondok Souvenir. 3. Wahana Bermain (Banana Boat, Kaya Kano, Alat Snorkeling.
2. Unit Perikanan	: -
3. Unit Pertanian (Agrowisata)	: -
4. Unit Perindustrian dan Perdagangan	: 1. Kios BBM Premium 2. Pengelolaan Pasar Tradisional Tempat Jual Beli (Berdagang Masyarakat/Pendatang)

2. Kegiatan Usaha Yang akan direncanakan dan dikembangkan

Nama Unit Usaha	Produk / Kegiatan Yang dilaksanakan atau dihasilkan
1. Perikanan	1. Penggemukan Ikan Kerapu Macan 2. Pembibitan Kerapu Macan
2. Pertanian (Agrowisata)	1. Kebun petik buah (Kelapa) 2. Pemanfaatan Daun, Lidi, Sabut, Batok, Batang, dari Pohon Kelapa.

³⁶ Ibid

Dengan berdirinya BUMDes Karya Mandiri ini mampu menyerap tenaga kerja di wilayah sekitar, hal ini dikarenakan BUMDes Karya Mandiri memperkerjakan masyarakat desa tersebut. Menurut data yang diperoleh dari BUMDes Karya Mandiri masyarakat yang bekerja sebanyak 51 orang.

4.3. Peran Pemerintah Desa Pulau Baguk Dalam Tahap Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Adapun tahap-tahap kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Pulau Baguk dibagi menjadi 4 tahap sebagai berikut:

4.3.1. Tahap Penyusunan Kebijakan

Penyusunan agenda merupakan suatu proses untuk memaknai apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang dipilih dan ditentukan adalah kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan prioritas masyarakat secara keseluruhan, bukan prioritas masyarakat secara kelompok ataupun golongan tertentu.

Kepala Desa Pulau Baguk menyampaikan bahwa sebelum pemerintah desa dan pengurus BUMDes menetapkan unit usaha apa yang cocok untuk dikembangkan di desa Pulau Baguk pihak desa terlebih dahulu melakukan kajian-kajian atau melihat potensi apa yang dimiliki wilayah desa Pulau Baguk yang cocok dijadikan usaha jangka panjang. Dari hasil kajian tersebut maka terpilihlah sektor pariwisata sebagai sektor yang ingin diprioritaskan dan Pulau Panjang sebagai tempat didirikannya BUMDes Karya Mandiri desa Pulau Baguk yang berfokus di bidang pariwisata. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Sebelum pemerintah desa dan pengurus BUMDes menetapkan unit usaha apa yang cocok untuk dikembangkan di desa Pulau Baguk pihak desa terlebih dahulu melakukan kajian-kajian atau melihat potensi apa yang dimiliki wilayah desa Pulau Baguk yang cocok dijadikan usaha jangka panjang. Dari hasil kajian tersebut maka terpilihlah Pulau Panjang sebagai tempat didirikannya BUMDes Karya Mandiri desa Pulau Baguk yang berfokus di Bidang Pariwisata.³⁷

Hal yang sama juga dipertegas oleh Ketua BUMDes Karya Mandiri dalam wawancaranya:

Kalau melihat potensi atau kajian-kajian yang dapat dikembangkan di desa Pulau Baguk secara jangka panjang itu ada dilakukan, seperti mensurvey ke desa itu, melihat apa yang tepat dan cocok dikembangkan di desa itu, nah dari kegiatan itu kami memutuskan bersama dengan kepala desa untuk mengembangkan di bagian pariwisatanya.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sebelum memutuskan memilih wisata bahari sebagai pengembangan desa Pulau Baguk sudah terlebih dahulu dilakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan potensi yang dapat berkembang dengan cepat di desa Pulau Baguk, kemudian diputuskan wisata bahari dapat berkembang dengan cepat, oleh karena itu wisata bahari yang dipilih.

³⁷Wawancara dengan Kepala Desa Pulau Baguk pada tanggal 04 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

³⁸Wawancara dengan Ketua BUMDes Karya Mandiri pada tanggal 05 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

Selanjutnya Ketua BUMDes Karya Mandiri juga menyampaikan:

*Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Untuk desa Pulau Baguk tersebut berdasarkan kajian-kajian yang kami lakukan memiliki potensi wisata, maka dari itu kami melakukan pengembangan supaya terurus dengan baik dan memberikan dampak yang menguntungkan untuk masyarakat sekitar.*³⁹

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa pada tahap penyusunan kebijakan untuk mengembangkan sektor pariwisata dan pembangunan BUMDes ini, pemerintah desa merupakan aktor utama yang bertindak dalam menentukan arah kebijakan strategis pengembangan desa, di samping juga para pengurus BUMDes.

4.3.2. Tahap Formulasi Kebijakan

Tahapan kedua yang dilakukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik adalah *policy formulating* atau melakukan formulasi kebijakan. Pokok-pokok permasalahan yang sudah ditentukan dan diramu sedemikian rupa oleh pemerintah kemudian dibahas secara lebih lanjut di dalam forum khusus untuk menetapkan kebijakan yang akan berlangsung di dalam negara atau daerah.

Pada tahap ini Ketua BUMDes Karya Mandiri menyampaikan bahwa tahap perencanaan wisata bahari di desa Pulau Baguk ini dengan cara

³⁹Wawancara dengan Ketua BUMDes Karya Mandiri pada tanggal 05 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

mengumpulkan seluruh pengelola BUMDes dan perangkat Desa juga masyarakat sekitar untuk melakukan musyawarah meminta pendapat dengan pemerintah Desa untuk menentukan perencanaan BUMDes sehingga dapat menentukan titik terangnya kemajuan wisata bahari ini. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Tahap-tahap perencanaan wisata bahari di desa Pulau Baguk ini dengan cara mengumpulkan seluruh pengelola BUMDes dan perangkat Desa juga masyarakat sekitar untuk melakukan musyawarah meminta pendapat dengan pemerintah Desa untuk menentukan perencanaan BUMDes sehingga dapat menentukan titik terangnya kemajuan wisata bahari ini. Kemudian juga tahap perencanaan dengan cara bermusyawarah dengan seluruh pengelola untuk melakukan tahap perencanaan kedepan yang disahkan dan disetujui oleh kepala Desa untuk kemajuan BUMDes di bidang wisata bahari.⁴⁰

Dalam tahap formulasi kebijakan ini, dapat dilihat bagaimana pemerintah desa Pulau Baguk turut mengikutsertakan stakeholders dan juga masyarakat dalam musyawarah terkait perencanaan BUMDes. Hal ini dipandang sebagai sebuah strategi untuk menghindari terjadinya politik perwakilan pemerintah sebagaimana yang diungkapkan oleh Herdy dan Beeton.⁴¹ Hal ini dikarenakan politik perwakilan pemerintah ini berpotensi mengurangi kepercayaan dan keterlibatan publik dan

⁴⁰Wawancara dengan Ketua BUMDes Karya Mandiri pada tanggal 05 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

⁴¹ “The role of local government to facilitate and spearhead sustainable tourism development”

oleh karenanya diperlukan menggunakan forum-forum publik dan konsultasi untuk tetap menjaga kepercayaan dan dukungan masyarakat.

4.3.3. Tahap Adopsi Kebijakan

Policy adoption atau pengadopsian kebijakan merupakan tahapan ketiga yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan publik yang akan diberlakukan secara umum bagi masyarakat. Adopsi kebijakan ini mempunyai tujuan secara legitimitasi untuk memberikan otorisasi atau kuasa pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik.

Pada tahap ini yang terlibat didalamnya ialah Perangkat Desa, Pengurus BUMDes, masyarakat desa Pulau Baguk dan Dinas Pariwisata sebagai pembina. Hal ini disampaikan oleh Ketua BUMDes dalam wawancaranya:

Yang terlibat ada perangkat Desa, pengurus BUMDes, masyarakat desa Pulau Baguk, dan Dinas Pariwisata sebagai Pembina.⁴²

Hal serupa juga dipertegas oleh kepala desa Pulau Baguk dalam wawancaranya menyampaikan:

Ada beberapa elemen yang terlibat dalam pengembangan wisata desa Pulau Baguk ini seperti ada Pengurus BUMDes, Perangkat Desa dan

⁴²Wawancara dengan Ketua BUMDes Karya Mandiri pada tanggal 05 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

*masyarakat desa juga dilibatkan. Semua Berperan dalam mengembangkan usaha milik desa.*⁴³

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pada tahap adopsi kebijakan ini pun, pemerintah desa Pulau Baguk juga melibatkan forum-forum publik dan konsultasi dalam rangka mendapatkan legitimasi atas kebijakan yang akan dijalankan tersebut. Dengan demikian, diharapkan opini publik terhadap kebijakan tersebut akan lebih positif serta dapat mengurangi respon-respon negatif yang mungkin muncul di masa depan.

4.3.4. Tahap Implementasi Kebijakan

Tahapan keempat yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan atau menetapkan kebijakan publik adalah *policy implementation*. *Policy implementation* atau implementasi kebijakan adalah suatu langkah yang dapat disebut sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat secara luas. Dalam tahapan ini, pemerintah melakukan perannya sebagai pengawas untuk mengawasi jalannya kebijakan publik yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Dalam tahap implementasi, Dinas pariwisata dan Kebudayaan membentuk sebuah asosiasi kelompok sadar wisata (pokdarwis) disini pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya menjadi pembina bagi asosiasi kelompok sadar wisata (pokdarwis) dimana setiap 2 bulan sekali mengadakan pertemuan untuk membahas perkembangan wisata di masing masing

⁴³Wawancara dengan Kepala Desa Pulau Baguk pada tanggal 04 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

kelompok sadar wisata (pokdarwis) termasuk pariwisata bahari di desa Pulau Baguk. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Kita sudah membentuk sebuah asosiasi kelompok sadar wisata (pokdarwis) disini pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya menjadi pembina bagi asosiasi pokdarwis, dimana setiap 2 bulan sekali kita mengadakan pertemuan untuk membahas perkembangan wisata di masing masing pokdarwis termasuk pariwisata bahari di Pulau Baguk.⁴⁴

Selain itu terkait dengan pengawasan ketua BUMDes dan Kepala Desa menyampaikan yang melakukan pengawasan terhadap BUMDes ini adalah kepala Desa dan di dampingi oleh PLD. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Kepala desa yang mengevaluasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes dari mulai pengelolaanya sampai laporan setiap bulannya yang diberikan ke kepada kepala Desa. Kemudian kami juga melibatkan masyarakat biar tidak terjadi penyelewengan yang tidak di inginkan bila ada tim pengawasan agar kinerja dari BUMDes ini bisa selalu di pantau⁴⁵.

Kemudian untuk memperkuat dalam bidang pengawasan setiap kegiatan yang dilakukan wajib melaporkan dalam bentuk laporan. Hal ini dilakukan untuk

⁴⁴ Wawancara dengan KABID Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 10 Juni 2022 di Singkil.

⁴⁵Wawancara dengan Ketua BUMDes Karya Mandiri pada tanggal 05 Juni 2022di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

memantau perkembangan wisata tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala desa Pulau Baguk dalam wawancaranya:

Biasanya ada laporan itu, jadi setiap pelaksanaan yang mereka lakukan, berapa pemasukan, berapa pengeluaran, apa yang akan dilakukan itu selalu dilaporkan, jadi kita dapat memantau perkembangannya.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan ini dilakukan dengan cara melakukan membentuk kelompok dasar wisata (pokdarwis) dan dievaluasi setiap 2 bulan sekali melalui musyawarah dan dilaporkan dalam bentuk laporan yang diserahkan kepada kepala desa.

Dalam hal ini, dapat dilihat bagaimana kontrol pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata di Desa Pulau Baguk cukup tinggi. Meskipun disebutkan pula bahwa pelibatan masyarakat tetap dilakukan, namun dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa fungsinya belum begitu signifikan.

4.4. Dampak Pengembangan BUMDes Karya Mandiri Bagi Masyarakat Pulau Baguk

4.4.1. Pembangunan Infrastruktur

Salah satu dampak yang sangat terasa dari kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan sektor pariwisata di desa Pulau Baguk adalah massifnya pembangunan infrastruktur demi menyokong sektor pariwisata

⁴⁶Wawancara dengan Kepala Desa Pulau Baguk pada tanggal 04 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala desa Pulau Baguk seperti berikut ini:

Pemerintah desa bekerja sama dengan BUMDes Karya Mandiri selalu berusaha membantu dalam pengembangan wisata bahari ini dengan membantu pembangunan-pembangunan yang berguna melengkapi fasilitas wisata seperti masjid, kamar mandi umum, pemeliharaan objek-objek wisata dan penginapan. Pembangunan tersebut diajukan dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa yang dilakukan setiap setahun sekali.⁴⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua BUMDes Karya Mandiri bahwa:

Sudah banyak kita bangun infrastruktur yang mendukung pariwisata bahari ini seperti Lahan Wisata (Gazebo dan Saung), ada gedung Penginapan (Couttage), Resto, AULA (Menerima Tempat DIKLAT/Pelatihan/ Seminar/ Acara Indoor), Kantin, Gerai Kelapa, Pondok Souvenir. Dengan adanya gedung gedung tersebut pastinya saat wisatawan datang sudah ada tempat menginap jadi wisatawan tidak linglung dalam mencari penginapan dengan menginap pastinya mereka butuh makanan, sudah kita sediakan kantin yang berjualan itu masyarakat dikelola oleh BUMDes, jadi berdampak bagi ekonomi masyarakat dan

⁴⁷Wawancara dengan Kepala Desa Pulau Baguk pada tanggal 04 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

lainnya yang berdampak terhadap pengembangan wisata bahari dan ekonomi masyarakat.⁴⁸

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa sudah banyak infrastruktur yang dibangun. Infrastruktur tersebut sangat berdampak dan mendukung pengembangan wisata bahari di desa Pulau Baguk. Hal ini dapat dilihat dari bangunan-bangunan yang berfungsi dengan baik dan mampu dimanfaatkan dengan baik.

4.4.2. Penyerapan Tenaga Kerja

Pengembangan sektor wisata yang dilakukan ini memiliki semangat dan visi masa depan yang lebih maju, menambah lapangan pekerjaan serta mensejahterakan masyarakat dengan usaha-usaha baru yang dilakukan oleh BUMDes. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua BUMDes Karya Mandiri dalam wawancaranya sebagai berikut:

Untuk usaha selanjutnya untuk kedepannya supaya BUMDes ini lebih maju lagi, menambah usaha lagi, dari pengelolaan BUMDes ini memudahkan masyarakat desa Pulau Baguk untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, sekarang kami mengusahakan kerja sama dalam membangun wisata bahari ini.⁴⁹

⁴⁸Wawancara dengan Ketua BUMDes Karya Mandiri pada tanggal 05 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

⁴⁹Wawancara dengan Ketua BUMDes Karya Mandiri pada tanggal 05 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

Hal senada juga ditegaskan oleh Kepala Desa bahwa :

Untuk kedepannya semoga BUMDes menjadi lebih baik lagi lebih maju banyak menciptakan peluang Usaha Bagi masyarakat desa Pulau Baguk sehingga bisa memajukan Desa ini melalui wisata baharinya.

Dampak positif dari kehadiran BUMDes Karya Mandiri tersebut telah berhasil mengurangi angka pengangguran di desa Pulau Baguk karena sektor pariwisata yang dikembangkan oleh BUMDes Karya Mandiri telah mendorong penyerapan tenaga kerja. Hal ini didukung oleh pernyataan beberapa tokoh masyarakat desa Pulau Baguk dalam wawancaranya sebagai berikut:

Dengan adanya BUMDes tersebut mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di desa Pulau Baguk, seperti masyarakat yang dulunya tidak ada pekerjaan dengan adanya BUMDes itu masyarakat sudah dapat pekerjaan, ini akan mampu mensejahterakan ekonomi masyarakat lokal disini

Masyarakat desa mengonfirmasi pernyataan tersebut di mana menurut mereka dengan adanya pengembangan wisata bahari yang dilakukan oleh BUMDes Karya Mandiri mampu menyerap tenaga kerja di desa tersebut, sehingga memberikan dampak ekonomi yang baik kepada masyarakat sekitar. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Ya, dengan adanya pariwisata bahari yang dikelola oleh BUMDes dapat menyerap tenaga kerja, banyaklah masyarakat yang dapat bekerja disana.⁵⁰

Selain itu, pengembangan wisata bahari oleh BUMDes Karya Mandiri, membawa banyak perubahan yang terjadi, di antaranya yaitu dengan banyaknya produk masyarakat dipromosikan menjadi produk khas desa Pulau Baguk, yang kemudian ini menghasilkan peningkatan ekonomi untuk masyarakat sekitar. Selain ada beberapa usaha UMKM masyarakat yang dikembangkan seperti usaha bot yang digunakan sebagai alat transportasi utama untuk mengangkut pengunjung menuju Pulau Panjang tempat wisata, Warung makan, Warkop yang dikelola oleh masyarakat sekitar serta oleh oleh khas. Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan oleh Ketua BUMDes Karya Mandiri dalam wawancaranya:

Banyak produk masyarakat dipromosikan menjadi produk khas desa Pulau Baguk, yang mana ini menghasilkan perubahan ekonomi untuk masyarakat sekitar, ada juga beberapa usaha UMKM masyarakat yang dikembangkan seperti usaha bot yang digunakan sebagai alat transportasi utama untuk mengangkut pengunjung menuju Pulau Panjang tempat wisata ada juga Warung makan, Warkop yang dikelola oleh masyarakat sekitar serta oleh oleh khas.⁵¹

⁵⁰Wawancara dengan masyarakat desa Pulau Baguk pada tanggal 09 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

⁵¹Wawancara dengan Ketua BUMDes Karya Mandiri pada tanggal 05 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa dengan hadirnya BUMDes Karya Mandiri tersebut tidak hanya mengembangkan potensi alam desa Pulau Baguk saja akan tetapi juga menyerap tenaga kerja masyarakat lokal yang mampu mengurangi angka pengangguran desa Pulau Baguk.

Untuk meningkatkan manfaat yang lebih luas lagi terkait penyerapan tenaga kerja, lebih lanjut lagi Ketua BUMDes Karya Mandiri juga menyampaikan bahwa promosi wisata bahari akan gencar dilakukan agar wisata ini mendapat perhatian dari masyarakat luar. Ini disampaikan dalam wawancaranya:

Yang pasti kami terus memantau perkembangan setiap program yang dijalankan. Apalagi yang berbentuk mensejahterakan masyarakat pasti kita perhatikan terus kemajuannya. Harus kita tingkatkan terus promosinya supaya wisata bahari di sana semakin dikenal oleh masyarakat luas. Promosi lewat sosial media harus makin digencarkan lagi.⁵²

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bagaimana pengembangan sektor wisata ini telah mendorong penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini pula yang memotivasi pemerintah untuk semakin meningkatkan promosi sektor wisata desa Pulau Baguk.

⁵²Wawancara dengan Ketua BUMDes Karya Mandiri pada tanggal 05 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

4.4.3. Tantangan Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Desa Pulau Baguk

Jika merujuk pada pengertian di atas ada beberapa hal yang diupayakan oleh BUMDes Karya Mandiri dalam mengatasi permasalahan dan kendala yang muncul, seperti mereka yang terbatas dalam penganggaran dana pembangunan pihak BUMDes melakukan peninjauan terlebih dahulu lagi terhadap pengelolaan BUMDes tersebut guna melihat program-program yang dijalankan berhasil atau tidak. Dan terus melakukan upaya kerjasama untuk menutupi kekurangan dana. Ini ditegaskan oleh Ketua BUMDes dalam wawancaranya:

Ketersediaan dana menjadi kendala terbesar, Kami harus melakukan peninjauan terlebih dahulu lagi terhadap pengelolaan BUMDes ini sebab jika tidak dana yang kami kelola ini tidak kelihatan hasilnya jadi kami akan lebih teliti lagi, untuk sementara menunggu pencairan Dana ini banyak hal yang akan kami pertimbangkan mengenai pengelolaan wisata ini apakah dana yang untuk BUMDes ini mencukupi atau tidak kami masih mnunggu sembari itu kami juga ingin melakukan kerja sama kalo pun itu tercapai akan memudahkan kami untuk melakukan pengelolaan. Seperti kejasama dengan Dinas Pariwisata, perangkat desa dan swasta.⁵³

Berdasarkan pernyataan di atas dapat menjelaskan bahwa dalam menghadapi permasalahan yang timbul seperti kekurangan dana, pihak BUMDes

⁵³Wawancara dengan Ketua BUMDes Karya Mandiri pada tanggal 05 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

Karya Mandiri berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti dinas pariwisata, pihak desa dan swasta untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

Selain ketersediaan dana masalah sumber daya manusia dalam proses pengelolaan wisata, kurang adanya koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat juga menjadi suatu masalah yang harus diatasi dan diantisipasi. BUMDes Karya Mandiri dalam mengatasi hal tersebut dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata seperti mengikuti pelatihan yang di adakan dari dinas pariwisata Kabupaten dan membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) agar semakin paham masalah terkait wisata. Hal ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata dalam wawancaranya:

Masalah sumber daya manusia dalam proses pengelolaan wisata, kurang adanya koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat juga menjadi suatu masalah yang harus diatasi dan diantisipasi. BUMDes Karya Mandiri dalam mengatasi hal tersebut dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan Pariwisata seperti mengikuti pelatihan yang di adakan dari dinas Pariwisata Kabupaten dan membentuk kelompok pokdarwis agar semakin paham masalah terkait wisata.⁵⁴

Masalahnya karena sistem insentif belum berjalan dengan baik dimana dalam pernyataannya masyarakat menyampaikan bahwa pengelolaan BUMDes ini termasuk kedalam kategori buruk, dikarenakan pengurus BUMDes dan Kepala

⁵⁴ Wawancara dengan KABID Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 10 Juni 2022 di Singkil.

Desa tidak transparan dalam mengelola keuangan dan kegiatan kegiatan yang dilakukan tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Pengelolaannya masih sangat buruk, Karena pengurus BUMDes dan kepala desa tidak transparan dalam mengelola keuangan dan kegiatan kegiatan yang dilakukan. Semua serba tertutup, masyarakat tidak dikasih tahu dan penjelasan terkait pengelolaan.⁵⁵



⁵⁵Wawancara dengan masyarakat desa Pulau Baguk pada tanggal 09 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V

PENUTUP

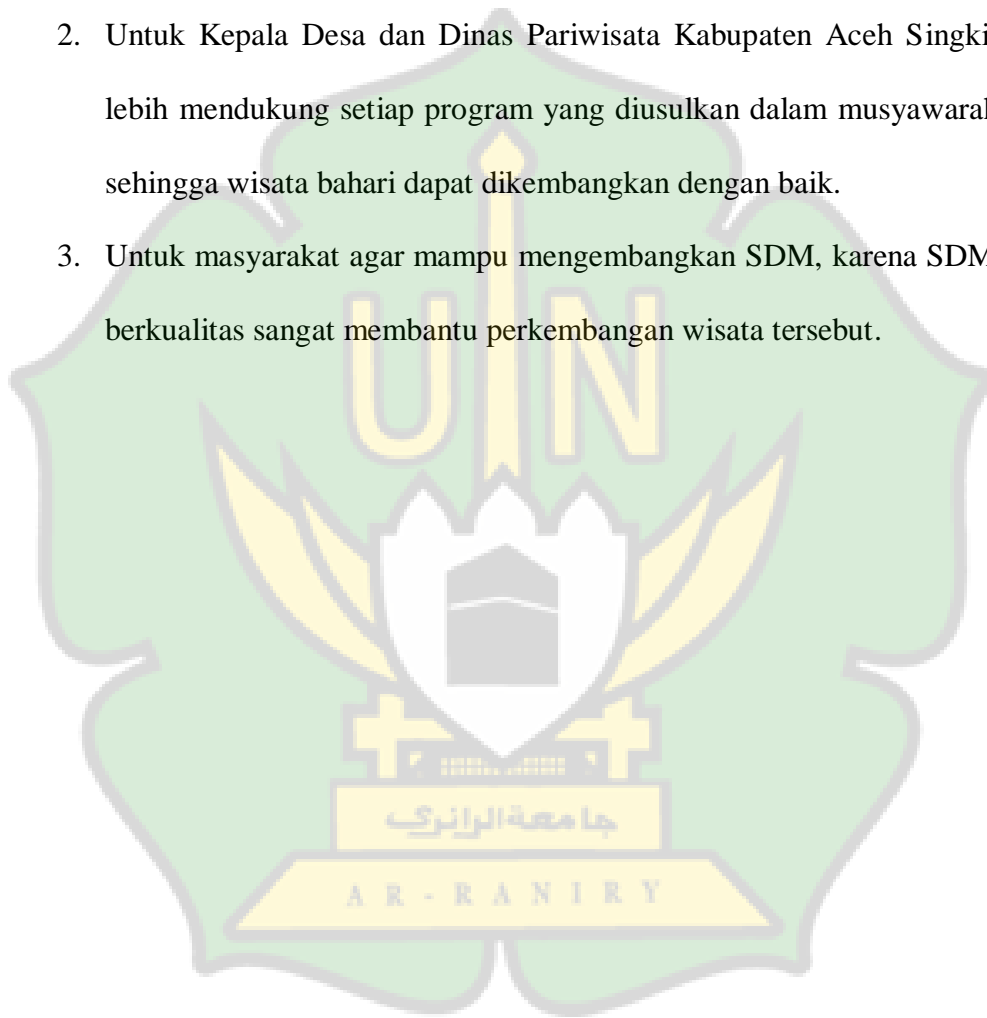
5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa pemerintah desa memainkan peran yang sangat dominan dalam seluruh tahapan kebijakan pengembangan sektor pariwisata di desa Pulau Baguk. Tahap-tahap kebijakan pembangunan tersebut melalui empat tahap yaitu, pertama pemerintah menyusun agenda yaitu menentukan prioritas pembangunan yang akan dilakukan, setelah mengkaji potensi desa tersebut didapati wisata bahari berpotensi tumbuh baik kedepan. Kedua tahap formulasi kebijakan dimana pemerintah mengadakan musyawarah bersama masyarakat dan perangkat desa untuk mendapatkan dukungan dalam merealisasikan kebijakan tersebut. Tahap ketiga adopsi kebijakan yaitu otorisasi kebijakan. Keempat tahap implementasi kebijakan dengan pelibatan masyarakat dan evaluasi didalamnya di mana pemerintah masih melakukan peran yang sangat penting.

Sedangkan dampak pengembangan wisata dan pembangunan BUMDes Karya Mandiri bagi masyarakat desa Pulau Baguk dapat dilihat dari membaiknya pembangunan-pembangunan infrastruktur dan penyerapan tenaga kerja yang dapat mengembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata di desa Pulau Baguk seperti kekurangan dana dalam pengelolaan, kekurangan SDM dan ketidakterbukaan tata kelola keuangan antara BUMDes Karya Mandiri dan pemerintah kepada masyarakat.

5.2. Saran

1. Untuk Ketua BUMDes Karya Mandiri agar lebih transparansi dalam mengelola keuangan. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat.
2. Untuk Kepala Desa dan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil agar lebih mendukung setiap program yang diusulkan dalam musyawarah desa sehingga wisata bahari dapat dikembangkan dengan baik.
3. Untuk masyarakat agar mampu mengembangkan SDM, karena SDM yang berkualitas sangat membantu perkembangan wisata tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Adnan *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pitumpidanenge Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar (2021)
- Anggraeni Rahmasari & Juliani Pudjowati *Strategi Pengembangan Desa Inovasi Pariwisata Kota Batu Dengan Local Economic Resources Development (LERD)*. Universitas Bhayangkara Surabaya (2017)
- Anshory, A., *Penerapan Aktivitas Pengembangan Wilayah*, Binarupa: Jakarta, 2002.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Ely Triyo *Strategi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi pada BUMDes Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya (2020)
- Gede Anom Sastrawan & I Nyoman Sunarta *Strategi Pengembangan Potensi Wisata Bahari Di Pantai Crystal Bay Desa Sakti, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungklung*. Fakultas Pariwisata Unud 2021.
- Januar Dwi Baskoro, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa: Yogyakarta*, 2018.
- Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Muhamad Imron, *Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas Di Desa Palaan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang* 2021
- Puji Wahyono, Maulana S Kusuma, Djoko Poernomo *Sentuhan Kreativitas dan Inovasi Wisata Kuliner Bahari Berkelanjutan (Karamba Jaring Apung di Kabupaten Situbondo)*. Universitas Jember 2021
- Rena Maulidiana, *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus*

Kredit Sahabat (Krabat) Desa Labuan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2018), Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (2020)

Rusneni Ruslan, *Strategi Pengembangan Wisata Bahari Kabupaten Takalar*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008),

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*

,
The role of local government to facilitate and spearhead sustainable tourism

Trisna, *Laporan Akhir Kajian Perencanaan Strategis Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata di Kampung Pasir Kunci*, Bandung: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2016.

Wawancara dengan Kepala Desa Pulau Baguk pada tanggal 04 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

Wawancara dengan KABID Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 10 Juni 2022 di Singkil

Wawancara dengan Ketua BUMDes Karya Mandiri pada tanggal 05 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

Wawancara dengan masyarakat desa Pulau Baguk pada tanggal 09 Juni 2022 di Desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

DOKUMENTASI



Sumber: Foto Pribadi (wawancara dengan KABID Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif)



Sumber: Foto Pribadi (wawancara dengan Kepala Desa Pulau Baguk)



Sumber: Foto Pribadi (wawancara dengan Ketua Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri)



Sumber: Foto Pribadi (wawancara dengan Wakil Panglima Laot Desa Pulau Baguk)



Sumber: Foto Pribadi (wawancara dengan Tour Guide Pulau Banyak)



Sumber: Foto Pribadi (wawancara dengan Nelayan Pulau Banyak)



Sumber: Foto Pribadi (wawancara dengan Ibu Rumah Tangga Desa Pulau Baguk)



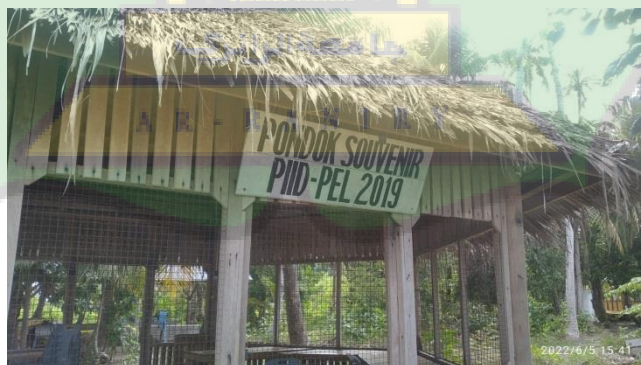
Sumber: Foto Pribadi (wawancara dengan Pekerja BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk)



Sumber: Foto Pribadi (Jalan Setapak BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk)



Sumber: Foto Pribadi (Kantin BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk)



Sumber: Foto Pribadi (Pondok Souvenir BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk)



Sumber: Foto Pribadi (Pembangunan Couttage/Penginapan VIP BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk)



Sumber: Facebook Kepala Desa Pulau Baguk (Halaman Couttage/Penginapan BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk)



Sumber: Facebook Kepala Desa Pulau Baguk (Land Mark BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk)



Sumber: Facebook Kepala Desa Pulau Baguk (Pekerja/Karyawan BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk)



Sumber: Facebook Kepala Desa Pulau Baguk (Souvenir BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk)



Sumber: Profil BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk (Aula BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk)



Sumber: Profil BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk (Ayunan Sunset BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk)



Sumber: Profil BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk (Banana Boat BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk)



Sumber: Profil BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk (Couttage/Penginapan BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk)



Sumber: Profil BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk (Gazebo BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk)



Sumber: Profil BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk (Trekking BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk)



Sumber: Profil BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk (Kayak BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk)



Sumber: Profil BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk (Lokasi Kemah BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk)

INSTRUMEN WAWANCARA

WAWANCARA UNTUK KEPALA DESA, KETUA BUMDES

1. Apa yang melatarbelakangi BUMDes melirik sektor pariwisata sebagai area fokus pengembangannya?

- **KEPALA DESA :** Awalnya BUMDes Karya Mandiri desa Pulau Baguk memiliki 4 unit usaha yaitu :

1. Unit Pariwisata
2. Unit Perikanan
3. Unit Pertanian
4. Unit Perindustrian dan Perdagangan.

Dari ke 4 unit usaha tersebut, hanya unit pariwisata yang bisa berkembang dengan cepat. Karena didukung dengan adanya potensi alam yang bisa memikat hati para wisatawan ketika berwisata ke Pulau Banyak. Maka Pemerintah desa dan pengurus BUMDes Sepakat untuk mendirikan BUMDes yang berfokus pada bidang pariwisata.

- **KETUA BUMDES :**
Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Untuk desa Pulau Baguk tersebut berdasarkan kajian-kajian yang kami lakukan memiliki potensi wisata, maka dari itu kami melakukan pengembangan supaya terurus dengan baik dan memberikan dampak yang menguntungkan untuk masyarakat sekitar.

2. Apakah ada analisis kebijakan yang dilakukan sebelum memutuskan untuk memulai pengelolaan pada bidang pariwisata?

- **KEPALA DESA :** Sebelum pemerintah desa dan pengurus BUMDes menetapkan unit usaha apa yang cocok untuk di

kembangkan di desa Pulau Baguk pihak desa terlebih dahulu melakukan kajian² atau melihat potensi apa yg dimiliki wilayah desa Pulau Baguk yg cocok dijadikan usaha jangka panjang. Dari hasil kajian tersebut maka terpilihlah Pulau Panjang sebagai tempat didirikannya BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk yang berfokus di Bidang Pariwisata.

- **KETUA BUMDES** : Kalau melihat potensi atau kajian-kajian yang dapat dikembangkan di desa Pulau Baguk secara jangka panjang itu ada dilakukan, seperti mensurvey ke desa itu, melihat apa yang tepat dan cocok di kembangkan di desa itu, nah dari kegiatan itu kami memutuskan bersama dengan kepala desa untuk mengembangkan di bagian pariwisatanya.

3. Data pendapatan per tahun berapa ? (minta data soft filenya kalau ada)
 - Untuk sebelum covid itu rata² pendapatan Perbulan 15 sampai 20 an juta. Namun saat covid melanda pendapatan turun drastis
4. Bagaimana Tahap Perencanaan Pengelolaan wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes?
 - Pengelolaan wisata Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pulau Baguk Dalam pengelolaan wisata ini ada beberapa kategori : (1). Tahap Perencanaan pengelolaan wisata, (2). Tahap pengelolaan wisata, (3) Tahap Pengawasan dan evaluasi, dilakukan oleh kepala Desa, dan di damping Pendamping Lokal Desa (PLD).
5. Apa saja target kerja pemerintah desa dan BUMDes terhadap perkembangan potensi wisata bahari ?
 - **KEPALA DESA** :Untuk kedepannya semoga BUMDes menjadi lebih baik lagi lebih maju banyak menciptakan peluang usaha bagi masyarakat desa Pulau Baguk sehingga bisa memajukan Desa ini melalui wisata baharinya. Kami juga ikut membantu dalam

pembangunan pembangunan objek wisata, biasanya hal hal seperti ini kami bahas dalam musrenbang.

- **KETUA BUMDES** : Untuk usaha selanjutnya untuk kedepannya supaya BUMDes ini lebih maju lagi, menambah usaha lagi, dari pengelolaan BUMDes ini memudahkan masyarakat Desa Pulau Baguk untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, sekarang kami mengusahakan kerja sama dalam membangun wisata bahari ini.

6. Sumber dana perkembangan potensi wisata bahari melalui Bumdes berasal dari mana?

- Dana Desa, KPDT Agrowisata dan KemenDes.

7. Bagaimana pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan wisata bahari ?

- **KEPALA DESA** : Dalam mengawasi jalannya pengelolaan ini saya selaku kepala Desa yang ditetapkan oleh pemerintah dan anggota BPD, ada juga PLD (pendamping lokal Desa) untuk membantu saya di lapangan.
- **KETUA BUMDES** : Yang melakukan pengawasan terhadap BUMDes ini adalah bapak kepala desa dan di damping oleh PLD, bapak kepala desa yang mengevaluasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes dari mulai pengelolaanya sampai laporan setiap bulannya yang di berikan ke kepada kepala Desa. Kemudian kami juga melibatkan masyarakat biar tidak terjadi penyelewengan yang tidak di inginkan bila ada tim pengawasan agar kinerja dari BUMDes ini bisa selalu di pantau.

8. Kendala apa saja yang didapati dalam pengembangan pengembangan wisata bahari?

- **KEPALA DESA** : BUMDes ini memang tujuannya untuk kemajuan Desa bersama namun dalam pengelolaan wisata

BUMDes ini saya selaku kepala Desa sebelumnya mengaku banyak sekali hambatan atau kendala mungkin saya boleh dikatakan baru terjun ke dunia pemerintahan Desa nah kendalanya yang saya temui dari awal musyawarah masyarakat tidak banyak yang hadir, kemudian setelah di lakukannya survey untuk penentuan lokasi lahan wisata yang akan dibangun ada sebagian masyarakat yang kurang setuju karena menurutnya lahan mereka sangat sempit ditambah dengan adanya pengikisan oleh pasang surut air laut, disitu kami melakukan musyawarah lagi untuk memastikan lahan yang akan dibangun di lokasi yang mana

- **KETUA BUMDES :** Ketersediaan dana, Kami harus melakukan peninjauan terlebih dahulu lagi terhadap pengelolaan BUMDes ini sebab jika tidak dana yang kami kelola ini tidak kelihatan hasilnya jadi kami akan lebih teliti lagi, untuk sementara menunggu pencairan Dana Tahap kedua ini banyak hal yang akan kami pertimbangkan mengenai pengelolaan wisata ini apakah dana yang untuk BUMDes ini mencukupi atau tidak kami masih mnunggu sembari itu kami juga ingin melakukan kerja sama kalo pun itu tercapai akan memudahkan kami untuk mlakukan pengelolaan.

9. Bagaimana Strategi BUMDes Karya Mandiri Dalam Pengembangan Potensi Wisata ?

- **KETUA BUMDES :** Melakukan tahap perencanaan wisata bahari di desa baguk ini dengan cara mengumpulkan seluruh pengelola BUMDes dan perangkat Desa juga masyarakat sekitar untuk melakukan musyawarah meminta pendapat dengan pemerintah Desa untuk menentukan perencanaan BUMDes sehingga dapat menentukan titik terangnya kemajuan wisata bahari ini. Kemudian juga Tahap perencanan dengan cara bermusywarah dengan seluruh pengelolah untuk melakukan tahap perencanan kedepan yang

disahkan dan di setujui oleh kepala Desa untuk kemajuan BUMDes di bidang wisata bahari.

10. Siapa saja actor atau stakeholder yang terlibat dalam pengembangan sector pariwisata desa tersebut dan apa peran masing-masing actor ?

- **KEPALA DESA DAN KETUA BUMDES** : Perangkat Desa dan Pengurus BUMDes. Semua Berperan dalam mengembangkan usaha milik desa.

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN ACEH SINGKIL

1. Bagaimana Tahap Perencanaan Pengelolaan wisata yang dilakukan oleh pemerintah ?

- **DINAS** : Dalam pengelolaan pariwisata yang dibahas dalam musyawarah desa maupun musyawarah kecamatan hasil rapatnya akan disalurkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh saran serta pendapat untuk membantu mengembangkan dan mengelola potensi kepariwisataan. Kemudian Untuk mengukur maju tidaknya pariwisata di sana salah satunya dengan kunjungan wisatawan, tri bulan sekali Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan monitoring, salah satunya untuk mendata jumlah wisatawan yang ada. Berdasarkan data kunjungan pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memantau atau monitoring perkembangan wisata. Selain itu Dinas pariwisata dan Kebudayaan membentuk sebuah asosiasi pokdarwis, disini pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya menjadi Pembina bagi asosiasi pokdarwis, disini setiap 2 bulan sekali mengadakan pertemuan untuk membahas perkembangan wisata di

masing masing pokdarwis termasuk pariwisata bahari di pulau bagus.

2. Apa saja target kerja pemerintah terhadap perkembangan potensi wisata bahari di Desa Bagus ?

- Yang pasti kami terus memantau perkembangan setiap program yang dijalankan. Apalagi yang berbentuk mensejahterakan masyarakat pasti kita perhatikan terus kemajuannya. Harus kita tingkatkan terus promosinya supaya wisata bahari di sana semakin dikenal oleh masyarakat luas. Promosi lewat sosial media harus makin digencarkan lagi.

3. Sumber dana perkembangan potensi wisata bahari di desa bagus berasal dari mana?

- Dana Desa, KPDT Agrowisata dan KemenDes. Dan proposal yang diajukan ke kami

4. Bagaimana pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan wisata bahari ?

- Biasanya ada laporan itu, jadi setiap pelaksanaan yang mereka lakukan, berapa pemasukan, berapa pengeluaran, apa yang akan dilakukan itu selalu dilaporkan, jadi kita dapat memantau perkembangannya.

5. Kendala apa saja yang didapati dalam pengembangan pengembangan wisata bahari?

- Dalam mengelola potensi pariwisata tidak selamanya berjalan dengan mulus. Pemerintah menemui berbagai kendala yang menghambat perkembangan pariwisata bahari tersebut. Seperti Rendahnya Sumber Daya Manusia dalam Proses Pengelolaan Wisata, Kurang Adanya Koordinasi Antara Pemerintah Desa

Dengan Masyarakat, Belum Terjalannya Kerjasama dengan Pihak Swasta.

6. Siapa saja actor atau stakeholder yang terlibat dalam pengembangan sector pariwisata desa Baguk tersebut dan apa peran masing-masing aktor ?
 - Perangkat Desa, Pengurus BUMDes, masyarakat desa baguk dan dinas pariwisata sebagai Pembina.

PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT

1. Bagaimana pendapatan masyarakat dengan adanya pariwisata yang di kelola oleh Bumdes, apakah meningkat atau biasa saja ?
 - Kalau di tanya pendapatan tidak ada yang berubah sama saja, akan tetapi dengan adanya pariwisata bahari yang dikelola oleh Bumdes dapat menyerap tenaga kerja, banyaklah masyarakat yang dapat bekerja disana.
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan wisata bahar di desa baguk ?
 - Pengelolaannya masih sangat buruk, Karena pengurus Bumdes dan kepala desa tidak transparan dalam mengelola keuangan dan kegiatan kegiatan yang dilakukan. Ssemua serba tertutup, masyarakat tidak dikasi tau dan penjelasan terkait pengelolaan.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 667/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal **09 Februari 2022**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Reza Idria, S.HI., M.A., Ph.D Sebagai pembimbing pertama
2. Melly Masni, M.I.R. Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Musni Setiawan T
NIM : 170801028
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Analisis Peran Pemerintah Desa Pulau Baguk Dalam Pengembangan Potensi Wisata Melalui BUMDES Karya Mandiri

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 02 Maret 2022

An. Rektor
Dekan,


Ernita Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAHAN DESA PULAU BAGUK
BUMDes KARYA MANDIRI DESA PULAU BAGUK KEC. PULAU BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Jln Swadaya no. kode pos 23791

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 13/III/BUMDesKM/2022
Lampiran : -
Perihal : *Balasan Permohonan Izin
Penelitian*

Pulau Banyak, 6 Juni 2022
Kepada Yth,
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Pemerintahan**
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 2 Juni 2022 perihal tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Musni Setiawan T dengan judul *"ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA PULAU BAGUK DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA MELALUI BUMDES KARYA MANDIRI"*.

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami
2. Izin melakukan penelitian di berikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja

Demikian surat balasan ini kami buat atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam.

Ketua
TPKK Karya Mandiri

ASRIL. B

